

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, tiap daerah-daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur keuangan daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berlaku, Otonomi memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Adanya pemberian Otonomi Daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan Pemerintah secara mandiri.

Untuk mencapai otonomi tersebut pembiayaan pemerintah dan Pembangunan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan suatu daerah atau tingkat kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Daerah akan lebih bebas dalam membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang terdapat didaerahnya.

Keberadaan Dinas Pendapatan Kota Padang sebagai organisasi publik tentunya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan perubahan dari zaman ke zaman karena adanya pengaruh dari globalisasi. Derasnya arus informasi dan komunikasi sebagaimana yang di alami saat ini. Isu-isu masyarakat menjadi isu strategis bagi kinerja Dinas Pendapatan Kota Padang saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Salah satu kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah yang potensial di Kota Padang adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari berbagai hambatan, antara lain masih sulitnya mengetahui secara tepat terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah habis masih berlakunya dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. Sehingga perlu kebijaksanaan pemerintah Kota Padang dalam hal ini meningkatkan upaya pemungutan pajak.

Berdasarkan Keadaan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di daerah Kota Padang serta pengaruh apasaja yang ditimbulkan oleh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota padang. Untuk mengetahui hal tersebut penulis membuat dalam bentuk laporan magang dengan judul **“KONTRIBUSI, PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA UPT P3 PADANG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013-2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Pajak kendaraan Bermotor merupakan prioritas utama sumber pendapatan Daerah. Mengingat peranannya yang cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga, dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 sampai tahun 2016?
2. Bagaimana Analisis perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2016.
2. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan peranan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

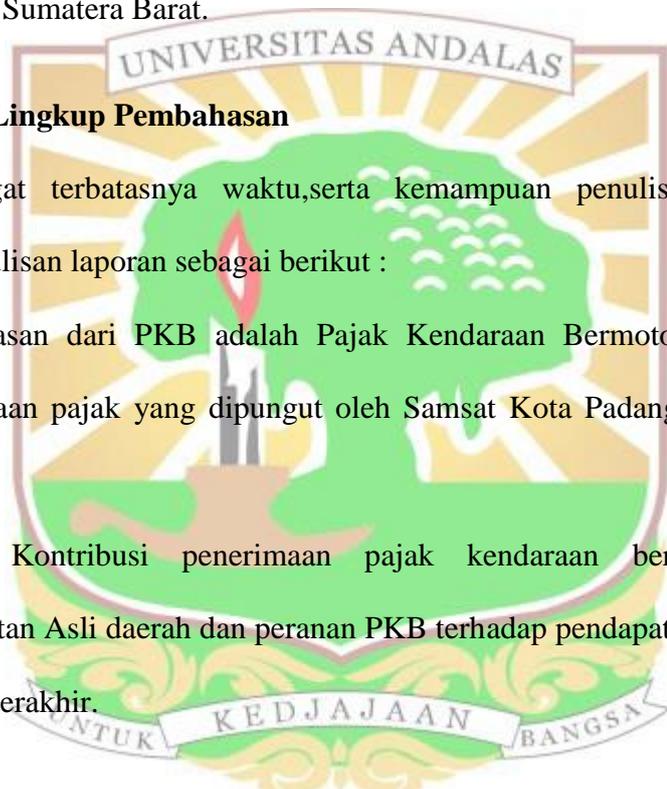
Mengingat terbatasnya waktu,serta kemampuan penulis. Maka penulis membatasi penulisan laporan sebagai berikut :

1. Pembahasan dari PKB adalah Pajak Kendaraan Bermotor perkembangan penerimaan pajak yang dipungut oleh Samsat Kota Padang selama 4 tahun terakhir.
2. Berapa Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli daerah dan peranan PKB terhadap pendapatan daerah selama 4 tahun terakhir.

1.5 Tujuan Magang dan Manfaat Magang

Magang merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh seluruh Mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang adapun tujuan yang hendak dicapai dalam magang ini adalah :

1. Untuk melengkapi SKS sesuai yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.



2. Untuk bisa mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari perkuliahan di lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja
4. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan berbagai macam karakter dan kepribadian disiplin ilmu yang berbeda.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh secara garis besar dari kegiatan magang ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang
 - b. Menambah bekal ilmu serta kemampuan untuk memahami keberadaan dunia kerja
 - c. Mampu bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang didalam lingkungan kerja.
2. Bagi Universitas Andalas

Kegiatan magang yang dilakukan diharapkan nantinya akan membantu Universitas dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, terutama dengan pengalaman-pengalaman yang telah didapat selama magang berlangsung. Sehingga, hal ini akan memudahkan lulusan dari Universitas Andalas untuk bekerja sesuai dengan bidangnya dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

3. Bagi Instansi Tempat Magang

Terjalannya kerjasama/hubungan baik antara Universitas dan instansi terkait sehingga instansi terkait akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa/i yang melakukan magang.

1.6 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Adapun rencana kegiatan magang ini dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang selama 40 (empat puluh) hari kerja yaitu pada tanggal 2 januari hingga tanggal 17 february 2017. Selama jangka waktu tersebut penulis berharap dapat melakukan kegiatan magang dengan baik dan memuaskan . Penulis juga berharap dapat ditempatkan pada bagian-bagian yang sesuai dengan judul laporan magang dan dapat bersosialisasi dengan pegawai kantor SAMSAT Padang.

1.7 Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan laporan ini, metode yang digunakan adalah

1. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data langsung ke Kantor Samsat Kota Padang sebagai penyelenggaraan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Analisa Data

Untuk analisa data yang telah didapat digunakan alat analisis kuantitatif yaitu menghitung besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

1.8 Sistematika Penyusunan

Yang di sajikan oleh penulis lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penyusunan laporan magang yang terdiri dari lima(5) bab, dimana masing-masing babnya berisi beberapa sub bab yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat magang, tempat, waktu dan kegiatan magang, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam Bab ini menjelaskan tentang pajak, klasifikasi pajak, fungsi pajak, tarif dan sistem pemungutan pajak, pajak daerah, jenis pajak daerah, kriteria pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD.

Bab III Gambaran Umum

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah kantor Samsat Kota Padang, dasar hukum berdirinya, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi di Samsat kota Padang.

Bab IV Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang analisis perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir, serta bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan laporan yang telah disajikan, kemudian penulis mengemukakan beberapa saran.

